

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Indonesia memiliki posisi strategis di mata dunia, dengan memiliki 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi *Choke point* lalu lintas internasional. dengan fakta tersebut, Indonesia dengan kekuatan lautnya akan memainkan peran sentral dalam mempertahankan kepentingan nasional dalam rangka menghadapi berbagai potensi ancaman terhadap pertahanan di laut. Saat ini jika membahas tentang laut, maka konsep tentang fungsi utama dari kekuatan angkatan laut untuk mempertahankan pengendalian laut untuk menangkal ancaman demi kepentingan nasional Indonesia sangat di perlukan. Pengendalian laut sangat menekankan pada pentingnya penguasaan laut (*sea control*) untuk membangun kekuatan negara, di mana negara harus memiliki kontrol terhadap wilayah laut seperti jalur perdagangan, *territorial waters, contiguous zones and economic exclusion zones*.

Pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 9 menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Keputusan Kasal Nomor KEP/1111/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe yang menjabarkan tugas TNI AL bahwa pelaksanaan tugas TNI AL diwujudkan dalam kegiatan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) meliputi Operasi Militer untuk Perang, yang terdiri atas Kampanye Militer dan Operasi Laut dengan kegiatan meliputi Operasi Pertahanan Laut, meliputi kegiatan Operasi Laut Aktif dan Operasi Laut Pasif. Sesuai dengan dasar landasan teori di atas perlu dirumuskan teori-teori yang relevan dan dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk menganalisis hasil penelitian.

2.1.1. Teori Strategi Pertahanan Negara Indonesia

Pertahanan negara merupakan usaha yang dilakukan oleh segenap warga negara dan bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari ancaman dan gangguan. Menurut penjelasan di atas, pertahanan negara sangat penting, karena terkait eksistensi sebuah negara. Ditambah masa sekarang, ancaman yang semakin berkembang sejak perang dingin. Di mana ancaman berubah dengan sangat fluktuatif dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Untuk itu, pertahanan negara juga telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, meliputi konsep, kebijakan maupun teknologi yang terkandung di dalam arti pertahanan itu sendiri. Kondisi tersebut menjadi sebuah jawaban atas tantangan yang diberikan oleh perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi yang menjadi fenomena saat ini. Indonesia, sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah luas, tentu saja memerlukan adaptasi terkait dengan tantangan di bidang pertahanan tersebut.

Pemberdayaan potensi pertahanan diarahkan untuk dapat mendukung transformasi sumber daya dan sarana prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan dengan menyinergikan fungsi K/L dan Pemda melalui pembinaan SDM; Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDB serta sarana dan prasarana nasional; Penerapan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia maupun yang bersifat universal; Penguasaan teknologi; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; dan Penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang terintegrasi dengan penataan ruang wilayah pertahanan.

2.1.2. Teori Strategi

Strategi di definisikan oleh Marrus (2002) sebagai suatu cara menyusun langkah-langkah yang biasanya di tetapkan oleh pemimpin atau ketua dan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan, baik itu jangka pendek atau jangka panjang organisasi, bersama dengan persiapan sarana atau perbaikan bagaimana membuat

tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya menurut ahli yang lain, (Robert, 1999) menjelaskan tentang strategi yang merupakan suatu bentuk atau langkah-langkah yang mengimplementasikan visi, misi dan tujuan bersama dan kemudian merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi sehingga menjadi suatu rangkaian yang terintegrasi. Strategi yang di rumuskan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi menjadi suatu kekuatan yang tangguh dalam menghadapi rintangan yang di hadapi. Lebih lanjut, Robert menjelaskan strategi yang baik disusun dengan memanfaatkan kelebihan yang di miliki oleh organisasi dan menutup kelemahan yang di miliki.

Dari kedua penjelasan para ahli di atas, maka strategi dapat di definisikan sebagai sebuah langkah-langkah yang di tetapkan oleh pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya telah lama di implementasikan dalam dunia pertahanan, salah satunya adalah dengan menghubungkan antara hubungan (ways) cara/alat (means) dengan tujuan (ends).

2.1.3 Konsep Strategi Pertahanan Laut Nusantara

Implementasi strategi peperangan laut sangat dipengaruhi oleh strategi pertahanan yang dianut oleh suatu bangsa. Dalam mengembangkan Strategi Pertahanan Laut Nusantara, TNI AL selaku komponen utama yang menjaga keamanan di daerah laut harus sesuai dengan konsep negara, yaitu negara kepulauan. Dengan memahami letak Indonesia pada posisi silang dua kawasan besar dunia, dan konsepsi dasar pertahanan nasional, TNI AL merumuskan konsep SPLN sebagai pedoman dasar operasional. Hal ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah yang ingin mengembangkan konsep poros maritime dunia (PMD).

Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) adalah strategi pertahanan yang disusun berdasarkan konsep geostrategi sebagai negara kepulauan, sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia

sebagai negara kepulauan. SPLN dirancang berdasarkan pada tiga pilar yang saling terkait mulai dari penangkalan, pertahanan berlapis, dan pengendalian laut. Konsep pertahanan berlapis yaitu konsep pertahanan yang bertumpu pada keterpaduan antara lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter. Konsep pertahanan negara yang bersifat *multilayer* memiliki tujuan untuk penangkalan, mengatasi dan menanggulangi ancaman militer atau nonmiliter dan untuk tujuan menghadapi perang berlarut.

Strategi pertahanan laut Nusantara (SPLN) bisa di implementasikan pada masa damai yang ditujukan untuk penangkalan terhadap kapal-kapal asing yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta untuk menciptakan kondisi perairan yurisdiksi nasional yang terkendali dan ditata dalam bentuk gelar operasi laut untuk penangkalan dan pengendalian laut (Mabesal, 2009). SPLN mempunyai Ends, Means dan Ways. di mana End, merupakan tujuan yaitu mempertahankan kedaulatan. Ways dengan cara kehadiran. Means dengan memakai alat sista KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) Angkatan Laut.

Kemampuan dalam pengendalian laut merupakan langkah pertama sekaligus yang paling penting dalam perjuangan pengendalian laut. Fase ini diakhiri dengan pencapaian tujuan strategis operasional. Tujuan dari strategi pertahanan laut sendiri adalah untuk mengendalikan laut, mengontrol laut, menguasai laut, serta memperoleh kedaulatan di laut. Strategi dilaksanakan pada masa damai, dan merupakan integrasi usaha pertahanan yang mencakup aspek politik, ekonomi, psikologi, dan teknologi, serta aspek militer. Menurut Vego (2017), konsep strategi pertahanan laut meliputi bentuk dan respon. Bentuk strategi pertahanan laut ditransformasikan dalam bentuk sistem pertahanan yang didukung postur unsur pangkalan, sementara respon ditunjukkan dalam postur pangkalan untuk mendukung unsur-unsur TNI AL guna menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa.

Dalam Doktrin TNI Angkatan Laut *Jalasveva Jayamahe*, diterapkan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN), sebagai berikut:

- 1) Strategi Penangkalan. Mencegah dan menangkal niat pihak lawan untuk mengganggu kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Strategi penangkalan dilakukan dengan beberapa operasi:
 - a) Naval Diplomacy. Berupa port visit, pameran gelar kekuatan di laut, latihan bersama dan juga patroli terkoordinasi dengan negara tetangga lainnya.
 - b) Naval Presence. Kehadiran angkatan laut di wilayah perbatasan atau di daerah rawan.
 - c) Pembangunan Kekuatan. Membangun dan melakukan pengadaan terkait dengan modernisasi peralatan tempur yang berimbans pada penangkalan (deterrence).
- 2) Strategi Pertahanan Berlapis (Layered Defense). Melakukan operasi untuk menghilangkan ancaman melalui lapisan pertahanan di laut, dengan:
 - a) penggelaran kekuatan gabungan laut dan udara untuk mencegah gerak maju lawan. Saat ini sudah ada Kogabwilhan sebagai bagian dari pertahanan berlapis.
 - b) Penggelaran kekuatan pada medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama dan medan/daerah perlawanan.
 - c) Penggelaran kekuatan sesuai forward defence concept.
- 3) Strategi Pengendalian Laut (Dalla). Menjamin penggunaan laut atau menguasai laut untuk kepentingan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan atau untuk kepentingan lawan. Kegiatan operasi yang dilaksanakan berupa:

- a) Operasi pemutusan garis perhubungan laut lawan.
- b) Operasi laut sehari-hari, seperti operasi keamanan laut dan penegakkan hukum di laut maupun operasi laut lainnya.
- c) Operasi siaga tempur laut, berupa operasi untuk peran naval diplomacy dan naval presence untuk memberikan efek penangkalan.

Selat Sunda merupakan perairan yang menghubungkan Laut Jawa dan Samudera Hindia, yang memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Secara geografis, batas Selat Sunda di sebelah utara adalah dibatasi oleh garis yang menghubungkan dari barat ke timur yaitu Tanjung Sumur Batu pada posisi koordinat $5^{\circ} 50' \text{ LS}$ dan $105^{\circ} 47' \text{ BT}$, di pantai bagian selatan Pulau Sumatera ke Tanjung Pujut pada posisi koordinat $5^{\circ} 53' \text{ LS}$ dan $105^{\circ} 02' \text{ BT}$ di pantai sebelah barat laut Pulau Jawa. Sedangkan batas di sebelah selatan adalah dibatasi garis yang menghubungkan dari barat ke timur yaitu Tanjung Guha Kolak pada posisi koordinat $6^{\circ} 50' \text{ LS}$ dan $105^{\circ} 15' \text{ BT}$ di pantai barat daya Pulau Jawa ke Tanjung Cuku Balimbing pada posisi koordinat $5^{\circ} 56' \text{ LS}$ dan $105^{\circ} 33' \text{ BT}$ di pantai sebelah selatan Pulau Sumatera. (IHO, 2010; 16).

2.1.4. Teori Pengendalian Laut

Menurut Vego (2005), Pengendalian Laut merupakan keadaan di mana adanya keleluasaan dalam menggunakan ruang laut untuk keuntungan negara dan mencegah adanya intervensi dari lawan. Pengendalian laut bertujuan untuk menanggulangi ancaman aspek laut dan menciptakan kondisi laut yang aman dan terkendali. Menurut Corbet, ada dua cara dalam pengendalian laut, yaitu dengan cara adanya ketepatan pengambilan keputusan dan blockade (Vego, 2009; Widden, 2012).

Sasaran tersebut kemudian disusun cara-cara pencapaian sasaran tersebut baik dalam kondisi damai maupun kritis/perang. Pada kondisi damai ditempuh dua

pendekatan strategi yaitu strategi penangkalan dan pengendalian laut. Sedangkan pada kondisi kritis/perang akan ditempuh strategi pertahanan berlapis dan pengendalian laut.

Admiral Henry Eccles dari *US Naval War College* merumuskan beberapa teori antara lain mengenai pengendalian laut. Eccles membedakan pengendalian laut sebagai berikut:

- a. Pengendalian mutlak (*absolut control*) yaitu penguasaan laut (*command of the sea*), dalam hal ini pihak yang menguasai laut memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menggunakan laut tanpa gangguan pihak lawan. Pihak lawan sama sekali tidak dapat menggunakan laut tersebut.
- b. Pengendalian kerja (*working control*), dalam klasifikasi ini pihak yang mengendalikan laut memiliki kemampuan untuk menggunakan sebagian laut tertentu pada waktu tertentu dengan derajat kebebasan yang tinggi. Pihak lawan dapat juga menggunakan laut yang sama, tetapi dengan resiko yang lebih besar.
- c. Pengendalian dalam pertikaian (*control in dispute*), di sini kedua belah pihak yang bermusuhan dapat menggunakan laut yang sama, tetapi masing-masing menanggung resiko yang sama besarnya.

Pada hakekatnya laut tidak dapat dikuasai secara mutlak sehingga Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah menetapkan jalur laut kepulauannya yang dapat dilintasi oleh kapal-kapal internasional, tentu juga berkewajiban atas keselamatan dan keamanannya. Pengendalian laut pada jalur ini adalah suatu upaya/kondisi di mana Indonesia memiliki kebebasan menggunakan jalur laut untuk kepentingan sendiri untuk menjamin kepentingan nasionalnya. Demikian juga negara lain yang memiliki tanggung jawab pada kawasan laut tertentu, hal ini

berbeda jika beberapa negara berkonflik sehingga keselamatan dan keamanan armada laut yang melintas di kawasan tersebut menjadi tidak aman.

2.1.5. Konsep Strategi Pengendalian *Chokepoint* Strategis

Seluruh komponen bangsa Indonesia mempunyai tujuan yang sama dalam pengelolaan laut Indonesia, yaitu terwujudnya stabilitas keamanan di laut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan integritas wilayah dan keleluasaan dalam pengelolaan laut sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk dapat mewujudkan kondisi keamanan di laut, diperlukan upaya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Masalah penegakan hukum di laut menjadi salah satu isu nasional yang sangat penting, mengingat kerugian yang dialami negara sangat besar, akibat berbagai pelanggaran hukum; antara lain illegal fishing, illegal migrant, illegal logging, dan illegal mining.

Admiral J.R. Hill dalam bukunya *Maritime Strategy for Medium Powers* mengungkapkan tentang strategi yang harus dilakukan oleh Negara *Medium Powers* seperti Indonesia dalam rangka penguasaan dan pengendalian (*sea command and sea control*) laut wilayah yurisdiksi nasional negaranya, di mana luas perairan sangat besar dan tidak sebanding dengan jumlah kapal atau armada Angkatan Lautnya, maka strategi yang dianjurkan adalah pengawasan pada selat-selat perbatasan. Pengendalian laut dilakukan dengan memblokir pelabuhan-pelabuhan strategis, pengawasan selat-selat kunci, dan melindungi armada niaga penting yang ditujukan terhadap lawan maupun bakal lawan.

Selain itu, dalam hal kekuatan alutsista maritime, konsep strategi maritim Corbett dalam bukunya berjudul *Some Principles of Maritime Strategy*, juga membahas bagaimana penggunaan kekuatan Angkatan Laut. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan kata Maritim dalam konsep strategi dinegara *maritime* besar sekalipun yang dimaksud adalah kekuatan Angkatan Laut. Asumsinya adalah bahwa kekuatan-kekuatan maritime lainnya yang dalam hal ini

adalah kekuatan non militer (sipil), merupakan kekuatan pengganda Angkatan Laut yang akan digunakan manakala Negara membutuhkan misalnya dalam masa krisis atau perang yang tentunya akan diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri.

2.1.6. Teori *Sea Power*

A. T. Mahan, dalam bukunya "*The Influence of Sea Power upon History*" mendefinisikan konsep sea power yaitu, sea power merupakan salah satu pondasi penting untuk kekuatan militer suatu negara. Yang mana apabila sea power suatu negara di berdayakan dengan baik maka akan berbanding lurus terhadap kesejahteraan suatu negara. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (± 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Mahan menyatakan tentang *deployment forces position* yang maksudnya adalah pangkalan TNI AL memiliki arti penting dalam menunjang tugas operasi TNI AL. Mahan juga menyebutkan bahwa suatu negara harus mengembangkan kekuatan lautnya untuk dapat mencapai kejayaan dan untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya. Ada enam unsur yang menentukan dapat tidaknya suatu negara berkembang menjadi kekuatan laut, yakni:

- a. Kedudukan geografi (*geographical position*),
- b. Bentuk tanah dan pantainya (*physical conformation*),
- c. Luas wilayah (*extent of territory*),
- d. Jumlah penduduk (*number of population*),
- e. Karakter penduduk (*national character*), dan

- f. Sifat pemerintahannya termasuk lembaga-lembaga nasional (*policy of government*).

Tiga syarat yang pertama, pada dasarnya berkaitan dengan geografi negara, sedangkan tiga syarat yang lain juga sangat berkaitan erat satu sama lain. Selain itu Mahan juga menggarisbawahi, bahwa *Sea Power* atau Kekuatan Laut merupakan unsur yang sangat penting bagi kejayaan suatu bangsa. Apa yang dimaksud dengan *Sea Power* atau Kekuatan Laut, pada dasarnya identic dengan Kekuatan Maritim atau *Maritime Power*. Apabila kekuatan-kekuatan itu diberdayakan, maka akan meningkatkan Kesejahteraan dan Keamanan Negara. Sebaliknya bila kekuatan-kekuatan itu kurang diberdayakan, maka dapat berakibat sangat merugikan negara atau meruntuhkan bangsa tersebut. Senada dengan Mahan, Joseph S Nye berpendapat bahwa dengan kemampuan militer yang kuat, negara lain akan berpikir ulang untuk melancarkan serangan atau sekedar mengganggu wilayah kedaulatan sebuah negara, meskipun dalam sejarah ada kalanya negara yang lebih lemah dalam konteks *military power* secara gegabah mendeklarasikan perang (mengancam) terhadap negara yang dalam kapabilitas *military power* lebih kuat (Nye, 2005).

2.2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari berbagai penelitian yang ada, terdapat beberapa hasil kajian terdahulu yang membahas tentang keamanan di Selat Sunda, namun yang membahas tentang pengendalian laut masih sedikit. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan kajian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan oleh Marsetio tahun 2013 dari intansi Angkatan Laut dengan judul “Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-strategis”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agar implementasi strategi TNI AL dalam pengamanan batas negara, khususnya di wilayah maritim maksimal,

harus adanya upaya serius dari Pemerintah, dan didukung oleh kerjasama dan dukungan dari semua stakeholder terkait, karena sinergitas sangat dibutuhkan dalam upaya mengelola permasalahan di perbatasan dan pulau terluar. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa, melalui pengelolaan yang sinergis, kawasan perbatasan dan pulau terluar sebagai beranda NKRI dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus memberikan dampak penangkalan terhadap ancaman yang datang dari negara lain.

- b. Penelitian ini dilakukan oleh Rachmad Jayadi (2017) dari universitas Pertahanan ini mengangkat penelitian yang berjudul “Implementasi kebijakan employment kekuatan tni Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional: studi kasus operasi pembebasan MV.Sinar Kudus”. Penelitian ini menemukan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi, regulasi sangat berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan laut di pengaruhi oleh regulator. Di antara aspek dalam regulasi yang mempengaruhi kekuatan laut adalah mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme penganggaran, mekanisme komando dan pengendalian, kesiapan alutsista serta penyusunan organisasi tugas.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Abdiyan Syaiful Hidayat tahun 2019 dari Universitas Gajah Mada dengan judul “Implementasi Strategi Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Dalam Mendukung Ketahanan Nasional”. Penelitian ini meneliti tentang penerapan taktik dan prosedur, kemampuan persenjataan, serta kemampuan sensor dan latihan dalam meningkatkan efektifitas operasi. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa taktik dan prosedur yang digunakan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Taktik dan prosedur tersebut secara detail menjelaskan pengerahan kekuatan laut

secara gabungan, metode deteksi dan penindakan, kepemimpinan, komando dan kendali, perencanaan dan pengambilan keputusan operasional, serta penggunaan fungsi-fungsi pendukung seperti intelijen, informasi operasi, logistik dan perlindungan. Taktik dan prosedur dalam pengendalian laut juga mencakup peperangan anti kapal permukaan karena sangat mungkin terjadi pelibatan terhadap kapal permukaan yang melakukan tindak pelanggaran baik *hostile act* maupun *hostile intent*. Selanjutnya penggelaran kekuatan di ALKI II dihadapkan dengan derajat ancaman yang ada maka persenjataan yang dimiliki KRI (Kapal Perang Republik Indonesia). masuk dalam kategori mampu untuk melaksanakan penindakan maupun bela diri. Kesiapan persenjataan merupakan bagian dari kesiapan operasional unsur sebagai bagian dari kesiapan operasional TNI AL yang merupakan kewajiban pokok Markas Besar Angkatan Laut sesuai amanat Pasal 16 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kesiapan operasional ditentukan oleh tiga elemen yang membentuk formulasi kesiapan operasional yaitu material, personel dan tingkat pelatihan. Kesiapan peralatan termasuk persenjataan merupakan syarat mutlak berfungsinya suatu sistem alat utama sistem senjata (alutsista) maupun organisasi yang dipengaruhi oleh laju kerusakan, kemampuan pemeliharaan dan dukungan material.

- d. Penelitian ini dilakukan oleh Tofan Hermawan (2019) dari Universitas Pertahanan. Penelitian ini berjudul “Strategi pertahanan laut Indonesia dalam analisa dampak dan upaya pemerintah mengamankan alur laut kepulauan indonesia”. Penelitian Ini mengemukakan bahwa Kemampuan dalam pencegahan dan penangkalan dan juga sinergitas pemerintah dan antar instansi yang lain, sangat berpengaruh dalam peningkatan pengendalian keamanan di kawasan ALKI. Hal ini akan berdampak pada

stabilitas keamanan. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa, dalam meminimalisir ancaman yang semakin multidimensi dibutuhkan upaya yang serius dari pemerintah dalam meningkatkan pertahanan dan kekuatan laut dalam mengantisipasi dan meminimalisir ancaman yang terjadi di wilayah ALKI.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Elvis tahun 2020 dari Universitas Pertahanan yang berjudul “Implementasi Pengamanan Selat Sunda Dalam Rangka Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia I”. Penelitian ini membahas upaya pengamanan Selat Sunda merupakan lalu lintas pelayaran cukup padat dan membuat wilayah tersebut rentan terhadap berbagai bentuk ancaman. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan jalur pelayaran. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengamanan di wilayah perairan Selat Sunda dalam rangka pengendalian ALKI I.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Ini
(sumber hasil olah peneliti (2021))

No	Peneliti (Tahun) Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Elvis (2020) berjudul "Implementasi Pengamanan Selat Sunda Dalam Rangka Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia I"	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif deskriptif sedangkan untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi	Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih adanya regulasi yang saling tumpang tindih antar instansi, sehingga penghambat dalam pengamanan di Selat Sunda hal ini ditambah dengan fakta lapangan yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap keamanan Selat Sunda masih rendah, sehingga pelaksanaan pengamanan Selat Sunda belum optimal	Sama sama meneliti tentang pengamanan Indonesia di Selat Sunda	Elvis meneliti Pengamanan Selat Sunda sebagai upaya Pengendalian ALKI I Penelitian ini meneliti tentang kemampuan pengendalian laut di Selat Sunda
2	Abdiyan Syaiful Hidayat (2019) berjudul "Implementasi Strategi Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Dalam Mendukung	Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif menggunakan metode Soft System Methodology (SSM)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor- faktor teknis operasi sangat mempengaruhi keberhasilan Koarmada II dalam mengimplementasikan strategi pengendalian laut di ALKI II.	Sama sama meneliti tentang strategi pengendalian laut	Abdiyan Syaiful Hidayat meneliti tentang pengendalian laut di ALKI II oleh Komando Armada II Penelitian ini meneliti tentang kemampuan pengendalian laut di

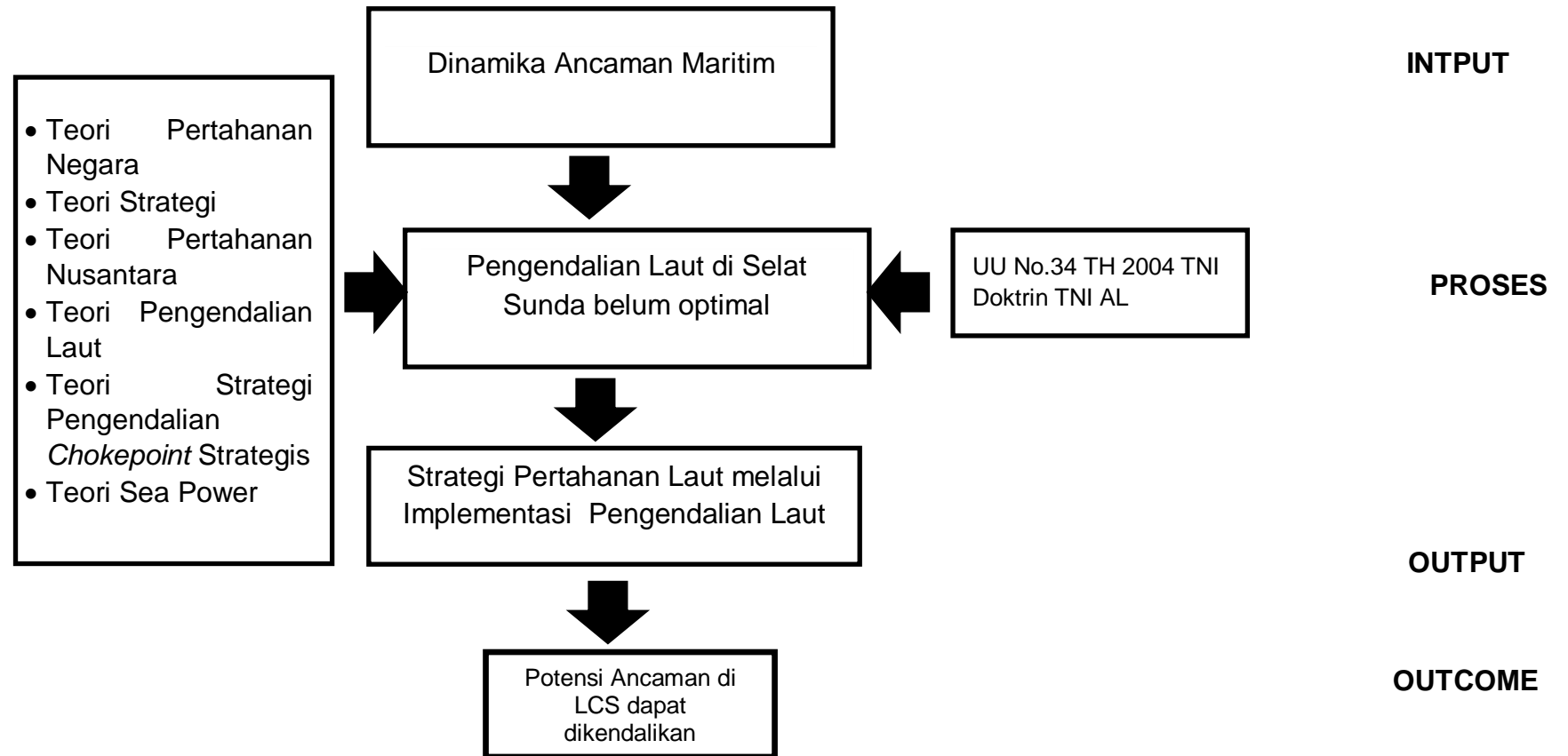
	Ketahanan Nasional”				Selat Sunda dengan instansi terkait lain yang memiliki kemampuan dan kewenangan di Selat Sunda
3	Marsetio (2013) Berjudul “Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-strategis	Penelitian ini menggunakan menggunakan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu sejarah	Upaya serius Pemerintah, Kerjasama dan dukungan dari semua stakeholder terkait sangat dibutuhkan dalam upaya mengelola permasalahan di perbatasan dan pulau terluar. Melalui pengelolaan yang sinergis, kawasan perbatasan dan pulau terluar sebagai beranda NKRI dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus memberikan dampak penangkalan terhadap negara lain	Meneliti dengan menggunakan teori Sea Power	Marsetio meneliti tentang pengamanan di perbatasan laut dengan negara lain

4	Tofan Hermawan (2019) Berjudul "Strategi pertahanan laut Indonesia dalam analisa dampak dan upaya pemerintah mengamankan alur laut kepulauan indonesia"	metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan pendekatan fenomenologis	Kemampuan dalam pencegahan dan penangkalan dan juga sinergitas pemerintah dan antar intansi yang lain, sangat berpengaruh dalam peningkatan pengendalian keamanan di kawasan ALKI, dan juga dibutuhkan upaya dalam meningkatkan pertahanan dan kekuatan laut dalam mengantisipasi dan meminimalisir ancaman yang terjadi di wilayah ALKI.	Sama-sama meneliti tentang pengendalian Laut	Abdiyan meneliti di tentang pengamanan di kawasan ALKI dengan memanfaatkan peran pemerintah dan intansi terkait sedangkan peneliti meneliti Pengendalian Laut oleh Angkatan Laut
5	Rachmad Jayadi (2017) berjudul "Implementasi kebijakan employment kekuatan tni Angkatan Laut di luar yurisdiksi nasional: studi kasus operasi pembebasan MV.Sinar Kudus"	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi, sehingga disarankan perlu adanya regulasi karena berpengaruh signifikan terhadap mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme penganggaran, mekanisme komando dan pengendalian, kesiapan alutsista serta penyusunan organisasi tugas	Memiliki fokus terhadap salah satu tugas dan fungsi TNI AL, yaitu pengendalian laut	Rahmad meneliti tentang operasi TNI AL di luar wilayah laut Indonesia Sedangkan dalam penelitian ini, hanya berfokus pada Selat Sunda yang berada di yuridiksi Indonesia

2.3. Kerangka berpikir

Ada sejumlah terminologi yang biasa digunakan untuk menjelaskan hal yang berkaitan tentang pengendalian laut (*control of the sea*) di Selat Sunda di mana pengendalian laut merupakan aksi penangkalan terhadap ancaman yang akan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengendalian Laut di Selat Sunda merupakan sebuah hal yang dianggap penting agar dapat menindak pelanggaran yang terjadi disana. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas juga harus diterapkan secara sungguh-sungguh oleh aparat Indonesia terhadap setiap pelanggar wilayah perairan Indonesia khususnya di Selat Sunda. Walaupun demikian, meski peraturan perundang-undangan dibenahi serta sarana dan prasarana dilengkapi, tanpa diikuti penegakan hukum yang tegas dan juga pembenahan mental aparat penegak hukum, maka mustahil pengendalian laut di Selat Sunda dapat dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan dengan kerangka pikir seperti di bawah ini sebagai panduan peneliti dalam melaksanakan proses menemukan jawaban yang ada pada permasalahan penelitian.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir
(sumber hasil olah peneliti (2021))